

**PENGARUH BELANJA MODAL, BELANJA PEGAWAI, *LEVERAGE*,
DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2014 – 2018**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana (S1)
Pada Program Studi Akuntansi
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Disusun Oleh:

Vera Felicia

NPM: 16 04 22676

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2020

**PENGARUH BELANJA MODAL, BELANJA PEGAWAI, *LEVERAGE*,
DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2014 – 2018**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana (S1)
Pada Program Studi Akuntansi
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Disusun Oleh:

Vera Felicia

NPM: 16 04 22676

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2020





PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGARUH BELANJA MODAL, BELANJA PEGAWAI, *LEVERAGE*,
DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2014 – 2018**

benar-benar hasil karya saya sendiri. Pernyataan, ide, maupun kutipan baik langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain dinyatakan secara tertulis dalam skripsi ini dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan plagiasi sebagian atau seluruhnya dari skripsi ini, maka gelar dan ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 15 Oktober 2020

Yang menyatakan



Vera Felicia

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan kasih-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi perkuliahan dan karya tugas akhir ini.

Skripsi dengan judul “Pengaruh Belanja Modal, Belanja Pegawai *Leverage*, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2018”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan-hambatan dimana tanpa bantuan dari orang-orang sekitar penulis, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, kasih dan kekuatan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Ch Heni Kurniawan, Se., M. Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staff dan karyawan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika yang memberikan pengajaran dan membantu peneliti selama menuntut ilmu di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Keluarga tercinta Papi, Ce Vina, Ce Gina, Ko Edwin, Ik lan, Ityu Siang, semua keponakan dan keluarga besar Pasuruan atas dukungan, doa, hiburan, dan semangat yang terus diberikan kepada penulis.
5. Vincent Limbang Jaya, pendamping istimewa yang senantiasa memberikan semangat, arahan, motivasi, dan doa untuk penulis.

6. Thalia, Ruthe, Aprel, Mia, Eka sahabat-sahabat penulis yang telah setia mengingatkan, membantu, memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
7. Jacki, Indra, Randy, Bun, Dony, Ko Jason, Dela, Intan, Mei, Tegar, Yola, Vincen, Ko Hen, Lina, Vania, Lukas, Yudha, Jeff, dan rekan-rekan dari EO Jason Enterprise lainnya yang telah menemani penulis selama di Yogyakarta dalam bekerja, menghibur, dan memberi semangat.
8. Sherly, Teje, Rosa, Bania, sahabat SMA penulis yang selalu mendengarkan, menyemangati dan memberikan motivasi pada penulis.
9. Desi, Sisca, Veren sahabat sekelas Brevet yang selalu membantu dan memberikan semangat.
10. Orang-orang baik yang penulis temui sepanjang menjalani perkuliahan, Depi, Ste, Dinda, Lelly, Urur, Ayu, Xina, Evelin yang telah membantu dan menemani peneliti selama duduk di bangku perkuliahan.
11. Teman-Teman KKN Kajoran yang telah memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini memiliki keterbatasan dan kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca supaya skripsi ini menjadi lebih baik. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 15 Oktober 2020



Vera Felicia

MOTTO

***“God doesn't make mistakes,
everything happens for a reason”***

You may not see it now but sooner or later, God will reveal why He let things to happen. Always remember that His ways is better than our ways. Put your trust in Him.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN SURAT KETERANGAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II	10
2.1. Pemerintah Daerah	10
2.2. Otonomi Daerah	10
2.3. Pendapatan Asli Daerah	11
2.4. Belanja Modal	15
2.5. Belanja Pegawai.....	17
2.6. Pinjaman Daerah	18
2.6.1. Rasio <i>Leverage</i>	20
2.7. Pertumbuhan Ekonomi.....	21

2.8. Kerangka Konseptual	21
2.8.1. Teori Entitas	21
2.8.2. Hubungan Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah	22
2.8.3. Hubungan Belanja Pegawai terhadap Pendapatan Asli Daerah	23
2.8.4. Hubungan Rasio <i>Leverage</i> terhadap Pendapatan Asli Daerah	23
2.8.5. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	24
2.9. Penelitian Terdahulu	24
2.10. Pengembangan Hipotesis	30
2.10.1. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah	30
2.10.2. Pengaruh Belanja Pegawai Terhadap Pendapatan Asli Daerah	30
2.10.3. Pengaruh Rasio <i>Leverage</i> Terhadap Pendapatan Asli Daerah	31
2.10.4. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	32
BAB III.....	33
3.1. Jenis Penelitian.....	33
3.2. Obyek dan Subjek Penelitian	33
3.3. Populasi Penelitian	33
3.4. Sampel Penelitian.....	33
3.5. Variabel Penelitian	34
3.6. Operasionalisasi Variabel.....	34
3.7. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	36
3.8. Rencana Analisa Data	36
3.8.1. Uji Asumsi Klasik.....	36
3.8.1.1. Uji Normalitas	36
3.8.1.2. Uji Multikolinearitas	36
3.8.1.3. Uji Heterokedastisitas	37
3.8.1.4. Uji Autokorelasi	37
3.8.2. Uji Statistik Deskriptif	38
3.9. Uji Hipotesis	38

3.9.1. Hipotesis Statistka.....	38
3.9.2. Tingkat Kesalahan.....	39
3.9.3. Model Pengujian Statistik	40
3.9.4. Teknik Pengujian	40
3.9.4.1. Uji Nilai t	40
3.9.4.2. Uji Nilai F	41
3.9.4.3. Uji Koefisien Determinasi	41
3.10. Rencana Pembahasan.....	41
BAB IV	42
4.1. Sampel Penelitian.....	42
4.2. Statistik Deskriptif	42
4.3. Uji Asumsi Klasik.....	44
4.3.1. Uji Normalitas.....	44
4.3.2. Uji Multikolinearitas.....	45
4.3.3. Uji Heterokedastisitas	46
4.3.4. Uji Autokorelasi.....	47
4.4. Pengujian Hipotesis.....	48
4.5. Pengujian Statistik.....	49
4.5.1. Uji t	49
4.5.2. Uji F	50
4.5.3. Koefisien Determinasi (R^2).....	51
4.6. Hasil dan Pembahasan.....	51
4.6.1. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah	51
4.6.2. Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Pendapatan Asli Daerah ...	52
4.6.3. Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Pendapatan Asli Daerah	53
4.6.4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	53
BAB V	55
5.1. Kesimpulan	55
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	57

5.3. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR REFERENSI	61
LAMPIRAN I.....	63
LAMPIRAN II.....	73



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tingkat Kemandirian Provinsi Maluku	6
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel	34
Tabel 4.1. Sampel Penelitian.....	42
Tabel 4.2. <i>Descriptive Statistic</i>	43
Tabel 4.3. Uji Normalitas.....	45
Tabel 4.4. Uji Multikolinearitas	46
Tabel 4.5. Uji Heteroskedastitas.....	47
Tabel 4.6. Uji Autokorelasi.....	48
Tabel 4.7. Uji Autokorelasi dengan <i>Cochrane Orcutt</i>	48
Tabel 4.8. Hasil Pengujian Hipotesis	49
Tabel 4.9. Uji F	50
Tabel 4.10. Uji Koefisien Determinasi	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Model Penelitian Positif.....39

Gambar 3.2. Model Penelitian Negatif.....39



**PENGARUH BELANJA MODAL, BELANJA PEGAWAI, *LEVERAGE*,
DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2014 – 2018**

**Disusun Oleh:
Vera Felicia
16 04 22676**

**Pembimbing:
Ch. Heni Kurniawan, Se., M.Si.**

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Yogyakarta
Jalan Babarsari 43-44 Yogyakarta**

Abstrak

Penelitian ini merupakan pengujian kembali terhadap penelitian Nata (2018) dengan menghapuskan variabel dana perimbangan, likuiditas, dan komponen PAD, serta mengganti variabel dependen menjadi Pendapatan Asli Daerah karena tingkat kemandirian di Provinsi Maluku terlalu rendah. Penelitian ini menambahkan variabel belanja pegawai dan pertumbuhan ekonomi, serta subjek penelitian yang berbeda yaitu seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

Jenis data dalam penelitian ini merupakan jenis data arsip sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari catatan yang sudah ada. Penelitian ini mengambil sampel menggunakan metode non-probabilitas dengan teknik *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini Laporan Realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Neraca, dan Laporan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku tahun anggaran 2014 – 2018 dengan jumlah 55 sampel.

Hasil penelitian ini menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Belanja Modal, Belanja Pegawai, *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, Belanja Modal, Belanja Pegawai, *Leverage*, Pertumbuhan Ekonomi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan terbagi menjadi banyak daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut dibagi lagi menjadi daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang dan bertanggung jawab akhir kepada pemerintah pusat. Menurut UU Nomor 23 tahun 2014,

“Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah (UU Nomor 23 tahun 2014). Salah satu tujuan diberakukannya otonomi daerah adalah agar pemerintah daerah dapat menggali sendiri sumber-sumber pendapatan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada diwilayahnya. Dengan begitu diharapkan pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, sehingga mampu membiayai keuangannya secara mandiri dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dikutip dari kabar24.bisnis.com (7 Maret 2019), Boediarso Teguh Wibowo, Direktur Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa jumlah penerimaan yang bersumber dari PAD perlu ditingkatkan, karena masih banyak potensi penerimaan yang belum sepenuhnya terkelola dengan

optimal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD yaitu dengan memaksimalkan belanja modal. Menurut PP No. 12 tahun 2019, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pemerintah daerah harus memaksimalkan belanja modal agar pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik sehingga dapat memperlancar kegiatan ekonomi dan menambah pendapatan daerah. Seharusnya belanja daerah lebih difokuskan untuk kepentingan publik daripada kepentingan aparatur. Akan tetapi faktanya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, porsi belanja pegawai masih jauh lebih besar dibanding porsi belanja modal.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/lembaga, Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai pemerintah, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai berperan dalam kinerja perangkat daerah, dengan memberikan kompensasi sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan mendorong produktifitas kerja para perangkat daerah (Darwis, 2015). Namun, tidak baik apabila porsinya terlalu besar karena belanja pegawai tidak memiliki hubungan langsung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga, apabila belanja pegawai terus meningkat akan menghambat pertumbuhan pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya menjadi sumber pemasukan utama pemerintah yang digunakan untuk pembangunan. Namun, pada kenyataannya masih banyak daerah yang bergantung pada dana transfer dari pusat. Dikutip dari economy.okezone.com (11 Juli 2019), Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menjelaskan, pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur masih sangat bergantung dari dana transfer yang terlihat dari dana transfer pada 2019 sebesar Rp 826,77 triliun atau

38% dari APBN. Mardiasmo juga mengatakan apabila ingin memaksimalkan pembangunan dan pemerataan di wilayah RI, tidak akan cukup jika hanya menggunakan APBN dan APBD. Beliau menyarankan agar daerah dapat mencari instrumen pembiayaan lain untuk pembangunan daerah

Salah satu instrumen pembiayaan yang dapat dilakukan untuk mendorong pembangunan yaitu dengan melakukan pinjaman daerah. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali (PP No. 56 Tahun 2018). Salah satu cara untuk menganalisis pinjaman daerah yaitu menggunakan analisis rasio. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Halim, 2007). Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio yang berhubungan dengan pinjaman yaitu rasio *leverage*. Rasio *leverage* adalah rasio yang mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam perusahaan dari kreditur (Halim, 2007).

Berkembangnya kegiatan produksi di daerah dengan adanya kegiatan pembangunan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan perekonomian daerah dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Yuliani, 2019).

Berdasarkan variabel yang akan diteliti, peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan variabel dependen, antara lain penelitian yang

dilakukan oleh Nata (2018) berjudul “Pengaruh Komponen PAD, Dana Perimbangan, Investasi, Likuiditas dan *Leverage* terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dan dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan variabel lain yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, investasi, likuiditas, *leverage* tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2016) yang berjudul “Pengaruh Komponen PAD, *Leverage*, dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah” menyatakan bahwa retribusi daerah dan investasi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan. *Leverage* dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan. Sedangkan pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2010) dengan judul “Pengaruh Likuiditas dan *Leverage* terhadap Kemandirian Daerah (Studi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2007 di Wilayah Provinsi Aceh)” menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan. Demikian juga dengan *leverage* berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan.

Penelitian yang dilakukan Sukijayanti (2016) dengan judul “Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Aktivitas, dan Pertumbuhan terhadap Kemandirian Daerah” menyimpulkan bahwa likuiditas, aktivitas dan pertumbuhan berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah. Sementara *leverage* tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novitasari dan Novitasari (2019) dengan judul “Pengaruh Pajak, Retribusi, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal, dan

Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Daerah” menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. DBH dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan Darwis (2015), dengan judul “Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa belanja modal dan belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Riki (2017), berjudul “Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa belanja modal dan belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Tolosang (2018) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan pengujian kembali terhadap penelitian Nata (2018) dengan menghapuskan variabel dana perimbangan, likuiditas, dan komponen PAD serta mengubah variabel dependen menjadi Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menambahkan variabel belanja pegawai dan pertumbuhan ekonomi, serta subjek penelitian yang berbeda yaitu seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Peneliti memilih subjek Provinsi Maluku karena provinsi tersebut merupakan provinsi dengan nilai realisasi PAD nomor

dua terendah dan paling berfluktuasi di Indonesia pada tahun 2014 – 2018 berdasarkan data di <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>. Peneliti mengubah variabel dependen menjadi Pendapatan Asli Daerah karena tingkat kemandirian di Provinsi Maluku terlalu rendah. Berikut tabel yang menunjukkan tingkat kemandirian Provinsi Maluku:

Tabel 1.1.
Tingkat Kemandirian Provinsi Maluku

No	Pemerintah Daerah	Kemandirian (%)						Pola Hubungan	Kemampuan Daerah
		2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata		
1	Kab. Buru	3,17	3,77	2,95	6,04	6,31	4,45	Instruktif	Rendah sekali
2	Kab. Buru Selatan	2,37	2,40	4,17	2,28	2,36	2,72	Instruktif	Rendah sekali
3	Kab. Kepulauan Aru	1,99	3,39	3,86	5,45	7,08	4,35	Instruktif	Rendah sekali
4	Kab. Maluku Barat Daya	2,62	3,34	5,82	6,23	7,31	5,06	Instruktif	Rendah sekali
5	Kab. Maluku Tengah	5,32	6,36	9,24	5,10	4,59	6,12	Instruktif	Rendah sekali
6	Kab. Maluku Tenggara	6,87	7,42	8,48	6,75	8,08	7,52	Instruktif	Rendah sekali
7	Kab. Maluku Tenggara Barat	3,69	4,79	4,39	3,61	5,66	4,43	Instruktif	Rendah sekali
8	Kab. Seram Bagian Barat	2,36	2,91	3,30	2,27	2,61	2,69	Instruktif	Rendah sekali
9	Kab. Seram Bagian Timur	2,03	2,59	2,95	2,78	3,36	2,74	Instruktif	Rendah sekali
10	Kota Ambon	14,45	15,57	14,00	16,37	17,80	15,64	Instruktif	Rendah sekali
11	Kota Tual	4,72	4,11	3,55	6,75	3,65	4,55	Instruktif	Rendah sekali

Tabel diatas menunjukkan kemandirian keuangan daerah Provinsi Maluku secara rata-rata sangat rendah, sehingga variabel kemandirian keuangan daerah diubah menjadi Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Belanja Modal, Belanja Pegawai, Leverage, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2018.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti menyimpulkan permasalahan pokok dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Apakah Belanja Pegawai berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan pengujian kembali terhadap penelitian Nata (2018) dengan menghapuskan variabel dana perimbangan, likuiditas, dan komponen PAD serta mengubah variabel dependen menjadi Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menambahkan variabel belanja pegawai dan pertumbuhan ekonomi, serta subjek penelitian yang berbeda yaitu seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Sehingga variabel independen yang digunakan yaitu belanja modal, belanja pegawai, *leverage*, dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan kembali karena tidak adanya konsistensi hasil penelitian berdasarkan delapan penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai faktor-faktor apa saja yang memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

2. Kontribusi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam mengambil langkah-langkah yang efektif dan efisien serta lebih baik lagi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi dalam perbaikan pendapatan asli daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, amanfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi penjelasan teori yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, model penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil pemilihan sampel, statistic deskriptif, hasil analisis data dan penjelasan dari setiap hasil statistik yang diperoleh.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang diajukan penulis sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data mengenai Belanja Modal, Belanja Pegawai, *Leverage*, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi Maluku tahun 2014-2018 menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien Belanja Modal menunjukkan arah negatif yaitu -5,750 dengan nilai signifikansi $> 0,05$ yaitu 0,238 yang berarti belanja modal tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan karena pengalokasian belanja modal terhadap total belanja masih rendah. Besaran alokasi ini tidak dapat memaksimalkan pembangunan di Provinsi Maluku, salah satunya untuk pembangunan infrastruktur konektivitas antar wilayah. Menurut www.kabartimurnews.com, alasan Provinsi Maluku masih menjadi daerah yang tertinggal yaitu karena infrastruktur konektivitas antarwilayah yang belum memadai sehingga menghambat mobilitas orang, barang, maupun sektor jasa yang ingin ke Provinsi Maluku sehingga penerimaan PAD juga ikut terhambat. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis penelitian ini tidak dapat diterima.
2. Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien Belanja Pegawai menunjukkan arah negatif yaitu 0,793 dengan nilai signifikansi $> 0,05$ yaitu 0,338 yang berarti belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Menurut data dari satumaluku.id, kecilnya APBD di Provinsi Maluku menyebabkan 60% dana APBD habis untuk biaya belanja pegawai. Gubernur Maluku mengatakan, dengan dana yang tersisa tidak mungkin dapat melakukan pembangunan secara merata, sehingga

tingginya belanja pegawai tidak dapat mendukung pertumbuhan pendapatan asli daerah. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis penelitian ini tidak dapat diterima.

3. Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien *Leverage* menunjukkan arah positif yaitu 0,572 dengan nilai signifikansi $> 0,05$ yaitu 0,913 tidak sesuai dengan hipotesis awal. Hal ini dikarenakan kekayaan bersih kabupaten/kota di Provinsi Maluku sebagian besar berwujud aktiva tetap, sehingga ekuitas yang dimiliki tidak dapat membantu pembangunan daerah dan tidak dapat mendorong peningkatan PAD. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis penelitian ditolak, *Leverage* tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
4. Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan arah positif sesuai hipotesis awal yaitu 2,806. Namun, nilai signifikansi dari Pertumbuhan Ekonomi $< 0,05$ yaitu 0,034 yang berarti pertumbuhan berpengaruh signifikan positif. Hal ini dikarenakan meningkatnya pertumbuhan Lapangan Usaha pertanian dan perikanan. Menguatnya pertumbuhan Lapangan Usaha pertanian dan perikanan, didorong oleh jalan trans maluku yang sudah jadi pada tahun 2018 sehingga hasil perkebunan dan perikanan yang merupakan hasil utama Pulau Seram dapat dibawa ke kota untuk diperjualbelikan, hal ini mendorong peningkatan PAD di Provinsi Maluku. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis penelitian ini dapat diterima, sehingga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini telah sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menguji kembali pengaruh antara belanja modal, belanja pegawai, *leverage*, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan belanja modal, belanja pegawai, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jurnal mengenai pengaruh belanja pegawai, dan *leverage* terhadap pendapatan asli daerah masih jarang ditemukan. Keterbatasan lain yang peneliti temukan adalah pada periode penelitian yang digunakan, masih terdapat kesenjangan alokasi belanja modal yang lebih rendah daripada belanja daerah lainnya terutama belanja pegawai. Hal ini menyebabkan belanja modal modal, dan belanja pegawai, tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian kembali dengan variabel yang sama dengan subjek berbeda karena jurnal mengenai pengaruh belanja pegawai, dan *leverage* terhadap pendapatan asli daerah masih jarang ditemukan untuk tujuan generalisasi.
2. Bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku diharapkan dapat memaksimalkan belanja modal dengan membangun konektivitas antar wilayah agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Darsie, N. (2008). *Pengelolaan Keuangan pada Suatu Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Gorontalo: PT. Indeks.
- Darwis, T.R.E. (2015). *Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat)*. Skripsi: Universitas Negeri Padang.
- Fitria, H. (2019). *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Purwokerto: CV IRDH.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, W. (2010). Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Kemandirian Daerah (Studi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2007 di Wilayah Provinsi Aceh). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. Vol. 3. No. 1.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- _____. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, J. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFU UGM.
- Kawatu, S.F. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Sleman: DEEPUBLISH.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press.
- Mardiasmo. (2002). *Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: JAAI UGM

- Nata, F.Y. (2018). *Pengaruh Komponen Pad, Dana Perimbangan, Investasi, Likuiditas dan Leverage terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*. Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Novitasari, M. & Novitasari, L. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 3. No. 2.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Purnama, A.W. (2016). *Pengaruh Komponen PAD, Leverage, dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Riki. (2017). *Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi: Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
- Seran, S. (2016). *Pendidikan & Pertumbuhan Ekonomi Versus Kemiskinan Penduduk (Kasus Provinsi Nusa Tenggara Timur)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Soleh, C., dan Heru, R. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Jakarta: Fokusmedia.

- Sukijayanti, L.D. (2016). *Pengaruh Likuiditas, Leverage, Aktivitas, dan Pertumbuhan terhadap Kemandirian Daerah*. Skripsi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Suwardjono. (2005). *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPF.
- Tolosang, D.K. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 18. No. 03.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Yuliani, I. (2019). *Pengaruh Belanja dan Investasi terhadap Kemandirian dan Perumbuhan Ekonomi Daerah*. Sidoarjo: Uwais Inspirasio Indonesia.

REFERENSI

- Economy.okezone.com. (2019, Juli 11). *Jangan Tergantung Dana Transfer APBN untuk Bangun Daerah.* (Diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2019/07/11/320/2077777/jangan-tergantung-dana-transfer-apbn-untuk-bangun-daerah> tanggal 10 April 2020).
- Kabar24.bisnis.com (2018, Maret 7). *Daerah Diminta Optimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).* (Diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20180307/78/747238/daerah-diminta-optimalkan-pendapatan-asli-daerah-pad> tanggal 9 Oktober 2020)
- Kabartimurnews.com (2019, April 11). *Bappenas Jelaskan Alasan Maluku Tertinggal.* (Diakses dari <https://www.kabartimurnews.com/2019/04/11/bappenas-jelaskan-alasan-maluku-tertinggal/> tanggal 17 September 2020).
- Satupaluku.id (2019, September 12). *60 Persen APBD Maluku Dipakai Belanja Pegawai, Gubernur Keluhkan Kecilnya APBD Cuma Rp 2,8 Triliun* (Diakses dari <https://www.satupaluku.id/2019/09/12/60-persen-apbd-maluku-dipakai-belanja-pegawai-gubernur-keluhkan-kecilnya-apbd-cuma-rp28-triliun/> tanggal 14 Oktober 2020)





Analisa Data							
Tahun	No.	Pemerintah Daerah	X1	X2	X3	X4	Y
2014	1	Kab. Buru	0,1924	0,4929	0,0066	0,0623	Rp 15.127.721.029
	2	Kab. Buru Selatan	0,3857	0,3104	0,0137	0,0625	Rp 11.075.938.022
	3	Kab. Kepulauan Aru	0,3083	0,0962	0,0228	0,0676	Rp 10.943.358.501
	4	Kab. Maluku Barat Daya	0,2913	0,3514	0,0221	0,0328	Rp 15.193.765.673
	5	Kab. Maluku Tengah	0,1883	0,6310	0,0016	0,0627	Rp 52.677.744.195
	6	Kab. Maluku Tenggara	0,2216	0,4924	0,0328	0,0618	Rp 32.566.078.104
	7	Kab. Maluku Tenggara Barat	0,2395	0,4812	0,0479	0,0648	Rp 22.590.856.453
	8	Kab. Seram Bagian Barat	0,2372	0,5149	0,0137	0,0606	Rp 13.413.045.855
	9	Kab. Seram Bagian Timur	0,2599	0,3671	0,0030	0,0337	Rp 11.257.095.672
	10	Kota Ambon	0,1457	0,6705	0,0024	0,0591	Rp 98.882.344.130
	11	Kota Tual	0,2914	0,3653	0,0191	0,0330	Rp 16.562.973.940

Tahun 2015							
Laporan Realisasi APBD							
Provinsi Maluku	PAD	Total Belanja Daerah	Belanja Modal	Belanja Pegawai	BP Tidak Langsung	BP Langsung	
Kab. Buru	Rp 20.901.125.742	Rp 667.178.761.550	Rp 198.230.862.474	Rp 261.817.564.712	Rp 261.817.564.712	Rp -	-
Kab. Buru Selatan	Rp 12.878.290.354	Rp 606.886.957.556	Rp 240.425.101.024	Rp 168.770.925.848	Rp 168.770.925.848	Rp -	-
Kab. Kepulauan Aru	Rp 21.742.724.643	Rp 658.900.206.319	Rp 129.268.110.243	Rp 188.969.741.112	Rp 188.969.741.112	Rp -	-
Kab. Maluku Barat Daya	Rp 22.462.530.778	Rp 655.273.525.350	Rp 194.422.415.897	Rp 195.464.426.314	Rp 195.464.426.314	Rp -	-
Kab. Maluku Tengah	Rp 65.551.091.828	Rp 1.381.150.797.844	Rp 332.245.278.023	Rp 438.110.016.970	Rp 438.110.016.970	Rp -	-
Kab. Maluku Tenggara	Rp 45.424.494.299	Rp 708.840.389.973	Rp 192.224.902.043	Rp 289.953.588.748	Rp 289.953.588.748	Rp -	-
Kab. Maluku Tenggara Barat	Rp 32.083.212.706	Rp 793.475.841.413	Rp 224.820.473.376	Rp 284.039.536.099	Rp 284.039.536.099	Rp -	-
Kab. Seram Bagian Barat	Rp 19.549.590.870	Rp 836.956.841.059	Rp 239.634.542.353	Rp 344.575.315.784	Rp 333.306.682.034	Rp 11.268.633.750	-
Kab. Seram Bagian Timur	Rp 18.017.881.708	Rp 840.446.524.665	Rp 255.354.867.378	Rp 221.317.498.617	Rp 221.317.498.617	Rp -	-
Kota Ambon	Rp 114.626.808.178	Rp 1.371.257.309.436	Rp 189.110.622.775	Rp 654.583.092.568	Rp 654.583.092.568	Rp -	-
Kota Tual	Rp 18.080.589.905	Rp 487.049.447.261	Rp 169.993.160.482	Rp 131.136.796.359	Rp 131.136.796.359	Rp -	-

Tahun 2015		
Laporan Neraca		
Provinsi Maluku	Total Kewajiban	Total Ekuitas
Kab. Buru	Rp 15.039.191.114,00	Rp 679.630.679.902,41
Kab. Buru Selatan	Rp 4.849.817.669,82	Rp 1.025.171.615.093,67
Kab. Kepulauan Aru	Rp 12.227.066.405,43	Rp 1.300.799.460.771,74
Kab. Maluku Barat Daya	Rp 14.414.088.903,72	Rp 1.026.198.396.612,54
Kab. Maluku Tengah	Rp 5.580.931.946,79	Rp 1.534.442.325.592,68
Kab. Maluku Tenggara	Rp 36.203.413.890,75	Rp 969.487.526.036,65
Kab. Maluku Tenggara Barat	Rp 59.999.880.135,09	Rp 1.217.092.988.288,07
Kab. Seram Bagian Barat	Rp 23.433.256.456,14	Rp 1.074.295.078.009,04
Kab. Seram Bagian Timur	Rp 13.101.880.013,18	Rp 1.473.854.385.841,27
Kota Ambon	Rp 6.794.566.311,24	Rp 1.280.672.622.998,68
Kota Tual	Rp 28.835.632.552,00	Rp 643.102.128.460,14

Analisa Data							
Tahun	No.	Pemerintah Daerah	X1	X2	X3	X4	Y
2015	1	Kab. Buru	0,2971	0,3924	0,0221	0,0523	Rp 20.901.125.742
	2	Kab. Buru Selatan	0,3962	0,2781	0,0047	0,0677	Rp 12.878.290.354
	3	Kab. Kepulauan Aru	0,1962	0,2868	0,0094	0,0502	Rp 21.742.724.643
	4	Kab. Maluku Barat Daya	0,2967	0,2983	0,0140	0,0338	Rp 22.462.530.778
	5	Kab. Maluku Tengah	0,2406	0,5344	0,0036	0,0536	Rp 65.551.091.828
	6	Kab. Maluku Tenggara	0,2712	0,4091	0,0373	0,0564	Rp 45.424.494.299
	7	Kab. Maluku Tenggara Barat	0,2833	0,3580	0,0493	0,0603	Rp 32.083.212.706
	8	Kab. Seram Bagian Barat	0,2863	0,4117	0,0218	0,0569	Rp 19.549.590.870
	9	Kab. Seram Bagian Timur	0,3038	0,2633	0,0089	0,0154	Rp 18.017.881.708
	10	Kota Ambon	0,1765	0,6110	0,0053	0,0657	Rp 114.626.808.178
	11	Kota Tual	0,3490	0,2692	0,0448	0,0559	Rp 18.080.589.905



Analisa Data								
Tahun	No.	Pemerintah Daerah	X1	X2	X3	X4	Y	
2016	1	Kab. Buru	0,2988	0,3322	0,0254	0,0572	Rp 21.257.161.494	
	2	Kab. Buru Selatan	0,3922	0,2284	0,0048	0,0618	Rp 26.985.938.551	
	3	Kab. Kepulauan Aru	0,2693	0,2342	0,0086	0,0525	Rp 28.037.720.937	
	4	Kab. Maluku Barat Daya	0,3251	0,2756	0,0129	0,0224	Rp 40.264.112.918	
	5	Kab. Maluku Tengah	0,2036	0,4718	0,0194	0,0594	Rp 120.254.443.505	
	6	Kab. Maluku Tenggara	0,3271	0,3508	0,0549	0,0571	Rp 59.068.867.917	
	7	Kab. Maluku Tenggara Barat	0,2344	0,3474	0,0244	0,0589	Rp 32.640.578.961	
	8	Kab. Seram Bagian Barat	0,2199	0,4051	0,0208	0,0557	Rp 25.988.089.631	
	9	Kab. Seram Bagian Timur	0,2475	0,2766	0,0048	0,0276	Rp 21.548.344.163	
	10	Kota Ambon	0,1687	0,5728	0,0336	0,0615	Rp 127.227.228.424	
	11	Kota Tual	0,3767	0,3028	0,0297	0,0581	Rp 19.691.231.855	

Tahun 2017							
Laporan Realisasi APBD							
Provinsi Maluku	PAD	Total Belanja Daerah	Belanja Modal	Belanja Pegawai	BP Tidak Langsung	BP Langsung	
Kab. Buru	Rp 39.973.487.646	Rp 784.365.064.016	Rp 141.619.175.542	Rp 283.495.386.218	Rp 283.495.386.218	Rp -	-
Kab. Buru Selatan	Rp 12.999.589.247	Rp 659.974.284.626	Rp 221.793.137.759	Rp 143.119.815.855	Rp 143.119.815.855	Rp -	-
Kab. Kepulauan Aru	Rp 43.525.983.087	Rp 1.016.898.887.356	Rp 254.589.863.635	Rp 210.566.573.934	Rp 210.566.573.934	Rp -	-
Kab. Maluku Barat Daya	Rp 49.763.939.793	Rp 1.051.640.318.303	Rp 333.764.881.072	Rp 226.355.901.907	Rp 226.355.901.907	Rp -	-
Kab. Maluku Tengah	Rp 66.958.583.664	Rp 1.629.020.559.213	Rp 364.918.834.453	Rp 469.305.403.326	Rp 469.305.403.326	Rp -	-
Kab. Maluku Tenggara	Rp 47.182.950.769	Rp 991.021.986.296	Rp 251.943.821.447	Rp 289.092.403.516	Rp 289.092.403.516	Rp -	-
Kab. Maluku Tenggara Barat	Rp 27.382.859.759	Rp 917.898.537.447	Rp 176.474.054.454	Rp 304.087.664.734	Rp 304.087.664.734	Rp -	-
Kab. Seram Bagian Barat	Rp 18.864.607.657	Rp 956.959.343.085	Rp 230.412.989.830	Rp 329.986.944.976	Rp 329.986.944.976	Rp -	-
Kab. Seram Bagian Timur	Rp 20.691.996.202	Rp 1.050.105.224.861	Rp 295.570.419.840	Rp 253.863.811.076	Rp 253.863.811.076	Rp -	-
Kota Ambon	Rp 139.372.008.189	Rp 1.084.108.406.554	Rp 201.284.225.942	Rp 531.467.511.789	Rp 531.467.511.789	Rp -	-
Kota Tual	Rp 29.342.794.616	Rp 644.680.816.666	Rp 205.841.431.346	Rp 130.920.183.938	Rp 130.920.183.938	Rp -	-

Tahun 2017		
Laporan Neraca		
Provinsi Maluku	Total Kewajiban	Total Ekuitas
Kab. Buru	Rp 5.893.347.511,00	Rp 1.106.907.691.869,87
Kab. Buru Selatan	Rp 8.772.733.224,10	Rp 1.317.045.653.511,62
Kab. Kepulauan Aru	Rp 6.773.014.289,66	Rp 1.681.685.019.306,10
Kab. Maluku Barat Daya	Rp 11.458.557.140,79	Rp 1.494.328.432.316,95
Kab. Maluku Tengah	Rp 14.929.062.698,11	Rp 1.590.707.352.585,32
Kab. Maluku Tenggara	Rp 19.781.007.030,00	Rp 1.300.923.553.755,40
Kab. Maluku Tenggara Barat	Rp 39.014.842.854,44	Rp 1.442.960.608.535,90
Kab. Seram Bagian Barat	Rp 30.341.991.392,00	Rp 988.503.478.245,25
Kab. Seram Bagian Timur	Rp 7.281.141.794,00	Rp 1.780.409.298.684,49
Kota Ambon	Rp 7.583.261.019,39	Rp 1.524.989.444.808,20
Kota Tual	Rp 14.496.276.230,13	Rp 987.419.570.435,96

Analisa Data							
Tahun	No.	Pemerintah Daerah	X1	X2	X3	X4	Y
2017	1	Kab. Buru	0,1806	0,3614	0,0053	0,0601	Rp 39.973.487.646
	2	Kab. Buru Selatan	0,3361	0,2169	0,0067	0,0613	Rp 12.999.589.247
	3	Kab. Kepulauan Aru	0,2504	0,2071	0,0040	0,0592	Rp 43.525.983.087
	4	Kab. Maluku Barat Daya	0,3174	0,2152	0,0077	0,0256	Rp 49.763.939.793
	5	Kab. Maluku Tengah	0,2240	0,4109	0,0094	0,0581	Rp 66.958.583.664
	6	Kab. Maluku Tenggara	0,2542	0,2917	0,0152	0,0591	Rp 47.182.950.769
	7	Kab. Maluku Tenggara Barat	0,1923	0,3313	0,0270	0,0590	Rp 27.382.859.759
	8	Kab. Seram Bagian Barat	0,2408	0,3448	0,0307	0,0588	Rp 18.864.607.657
	9	Kab. Seram Bagian Timur	0,2815	0,2418	0,0041	0,0397	Rp 20.691.996.202
	10	Kota Ambon	0,1857	0,4902	0,0050	0,0617	Rp 139.372.008.189
	11	Kota Tual	0,3193	0,2031	0,0147	0,0574	Rp 29.342.794.616

Tahun 2018							
Laporan Realisasi APBD							
Provinsi Maluku	PAD	Total Belanja Daerah	Belanja Modal	Belanja Pegawai	BP Tidak Langsung	BP Langsung	
Kab. Buru	Rp 46.257.089.676	Rp 939.853.601.223	Rp 262.173.037.793	Rp 281.644.137.740	Rp 281.644.137.740	Rp -	
Kab. Buru Selatan	Rp 15.506.213.191	Rp 760.332.858.086	Rp 265.655.391.586	Rp 157.421.462.225	Rp 157.421.462.225	Rp -	
Kab. Kepulauan Aru	Rp 59.274.150.040	Rp 1.030.880.353.263	Rp 226.455.937.732	Rp 226.836.540.705	Rp 226.836.540.705	Rp -	
Kab. Maluku Barat Daya	Rp 49.399.756.084	Rp 951.378.633.493	Rp 239.955.993.364	Rp 215.664.874.493	Rp 215.664.874.493	Rp -	
Kab. Maluku Tengah	Rp 59.820.016.826	Rp 1.572.303.865.038	Rp 345.096.715.810	Rp 469.880.424.251	Rp 469.880.424.251	Rp -	
Kab. Maluku Tenggara	Rp 55.136.774.870	Rp 923.525.680.970	Rp 217.617.469.619	Rp 232.562.369.412	Rp 232.562.369.412	Rp -	
Kab. Maluku Tenggara Barat	Rp 40.443.615.590	Rp 932.137.720.913	Rp 174.969.642.058	Rp 316.695.238.495	Rp 316.695.238.495	Rp -	
Kab. Seram Bagian Barat	Rp 23.233.152.017	Rp 989.268.737.223	Rp 276.383.658.525	Rp 342.127.039.183	Rp 342.127.039.183	Rp -	
Kab. Seram Bagian Timur	Rp 24.483.710.263	Rp 960.936.694.879	Rp 239.768.852.556	Rp 257.811.848.963	Rp 257.811.848.963	Rp -	
Kota Ambon	Rp 154.973.387.894	Rp 1.189.472.275.359	Rp 173.060.782.501	Rp 496.710.637.925	Rp 496.710.637.925	Rp -	
Kota Tual	Rp 19.109.294.060	Rp 627.088.090.714	Rp 170.610.589.085	Rp 141.188.156.607	Rp 141.188.156.607	Rp -	

Tahun 2018		
Laporan Neraca		
Provinsi Maluku	Total Kewajiban	Total Ekuitas
Kab. Buru	Rp 55.392.393.314,00	Rp 1.250.536.464.049,57
Kab. Buru Selatan	Rp 12.087.333.429,07	Rp 1.477.513.290.928,70
Kab. Kepulauan Aru	Rp 11.300.831.795,00	Rp 1.885.629.374.906,10
Kab. Maluku Barat Daya	Rp 10.296.707.639,83	Rp 1.671.683.523.645,21
Kab. Maluku Tengah	Rp 11.267.161.834,78	Rp 2.121.682.695.377,44
Kab. Maluku Tenggara	Rp 5.492.299.846,00	Rp 1.410.089.492.534,46
Kab. Maluku Tenggara Barat	Rp 141.019.791.772,01	Rp 2.190.769.712.180,47
Kab. Seram Bagian Barat	Rp 42.811.976.411,00	Rp 1.186.657.629.181,02
Kab. Seram Bagian Timur	Rp 11.300.831.795,00	Rp 1.838.790.796.386,30
Kota Ambon	Rp 53.076.412.010,95	Rp 1.573.778.899.733,70
Kota Tual	Rp 18.366.774.428,78	Rp 1.198.756.422.278,20

Analisa Data							
Tahun	No.	Pemerintah Daerah	X1	X2	X3	X4	Y
2018	1	Kab. Buru	0,2790	0,2997	0,0443	0,0622	Rp 46.257.089.676
	2	Kab. Buru Selatan	0,3494	0,2070	0,0082	0,0602	Rp 15.506.213.191
	3	Kab. Kepulauan Aru	0,2197	0,2200	0,0060	0,0605	Rp 59.274.150.040
	4	Kab. Maluku Barat Daya	0,2522	0,2267	0,0062	0,0285	Rp 49.399.756.084
	5	Kab. Maluku Tengah	0,2195	0,4261	0,0053	0,0594	Rp 59.820.016.826
	6	Kab. Maluku Tenggara	0,2356	0,2518	0,0039	0,0596	Rp 55.136.774.870
	7	Kab. Maluku Tenggara Barat	0,1877	0,3398	0,0644	0,0600	Rp 40.443.615.590
	8	Kab. Seram Bagian Barat	0,2794	0,3458	0,0361	0,0595	Rp 23.233.152.017
	9	Kab. Seram Bagian Timur	0,2495	0,2683	0,0061	0,0198	Rp 24.483.710.263
	10	Kota Ambon	0,1455	0,4176	0,0337	0,0621	Rp 154.973.387.894
	11	Kota Tual	0,2721	0,2251	0,0153	0,0598	Rp 19.109.294.060

PDRB ADHK di Maluku menurut Lapangan Usaha

Provinsi Maluku	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Buru	Rp 1.108.482,91	Rp 1.177.518,67	Rp 1.239.094,91	Rp 1.309.986,99	Rp 1.388.750,57	Rp 1.475.062,75
Kab. Buru Selatan	Rp 621.698,12	Rp 660.559,68	Rp 705.279,31	Rp 748.856,83	Rp 794.736,22	Rp 842.551,33
Kab. Kepulauan Aru	Rp 1.624.364,75	Rp 1.734.152,01	Rp 1.821.139,26	Rp 1.916.829,33	Rp 2.030.356,66	Rp 2.153.277,79
Kab. Maluku Barat Daya	Rp 732.569,65	Rp 831.198,54	Rp 841.626,99	Rp 892.498,54	Rp 946.841,67	Rp 1.004.707,31
Kab. Maluku Tengah	Rp 4.167.895,97	Rp 4.429.044,98	Rp 4.666.260,72	Rp 4.943.327,53	Rp 5.230.454,66	Rp 5.540.976,92
Kab. Maluku Tenggara	Rp 1.400.550,38	Rp 1.487.036,16	Rp 1.570.944,96	Rp 1.660.713,31	Rp 1.758.913,37	Rp 1.863.697,09
Kab. Maluku Tenggara Barat	Rp 1.185.488,84	Rp 1.262.250,61	Rp 1.338.342,62	Rp 1.417.195,93	Rp 1.500.790,78	Rp 1.590.855,76
Kab. Seram Bagian Barat	Rp 1.403.352,79	Rp 1.488.442,52	Rp 1.573.110,75	Rp 1.660.761,37	Rp 1.758.399,85	Rp 1.863.089,51
Kab. Seram Bagian Timur	Rp 1.537.041,70	Rp 1.663.493,13	Rp 1.760.134,30	Rp 1.848.628,38	Rp 1.910.392,58	Rp 1.917.693,54
Kota Ambon	Rp 7.274.166,27	Rp 7.704.150,15	Rp 8.210.004,37	Rp 8.715.003,73	Rp 9.252.475,16	Rp 9.827.384,59
Kota Tual	Rp 1.066.300,30	Rp 1.132.473,24	Rp 1.195.770,13	Rp 1.265.188,47	Rp 1.337.783,92	Rp 1.417.789,54

LAMPIRAN II

HASIL OLAH DATA

1. Tabel Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	55	,15	,40	,2617	,06190
Belanja Pegawai	55	,10	,67	,3496	,12126
Leverage	55	,00	,06	,0183	,01538
Pertumbuhan Ekonomi	55	,02	,07	,0533	,01334
Ln_Y	55	23,12	25,77	24,1804	,69268
Valid N (listwise)	55				

2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,54240814
Most Extreme Differences	Absolute	,103
	Positive	,103
	Negative	-,087
Kolmogorov-Smirnov Z		,767
Asymp. Sig. (2-tailed)		,599

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

3. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	25,248	,674		37,434	,000		
Belanja Modal	-5,750	1,570	-,514	-3,664	,238	,623	1,604
Belanja Pegawai	,793	,820	,139	,968	,338	,595	1,679
Leverage	,572	5,185	,013	,110	,913	,925	1,081
Pertumbuhan Ekonomi	2,806	6,188	,054	,453	,034	,863	1,159

a. Dependent Variable: Ln_Y

4. Uji Heterokedastistas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,643	,354		1,816	,075
Belanja Modal	-,913	,824	-,191	-1,109	,273
Belanja Pegawai	,269	,430	,110	,626	,534
Leverage	-,641	2,720	-,033	-,235	,815
Pertumbuhan Ekonomi	-,666	3,247	-,030	-,205	,838

a. Dependent Variable: Abs_Res

5. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,622 ^a	,387	,338	,56369	1,211

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, Leverage, Belanja Pegawai

b. Dependent Variable: Ln_Y

Uji Autokorelasi setelah *Cochrane Orcutt*Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,793 ^a	,629	,599	,46717	1,758

a. Predictors: (Constant), Lag_X4, Lag_X3, Lag_X1, Lag_X2

b. Dependent Variable: Lag_LnY

6. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25,248	,674		37,434	,000
	Belanja Modal	-5,750	1,570	-,514	-3,664	,238
	Belanja Pegawai	,793	,820	,139	,968	,338
	Leverage	,572	5,185	,013	,110	,913
	Pertumbuhan Ekonomi	2,806	6,188	,054	,453	,034

a. Dependent Variable: Ln_Y

7. Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10,023	4	2,506	7,886	,000 ^a
	Residual	15,887	50	,318		
	Total	25,910	54			

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, Leverage, Belanja Pegawai

b. Dependent Variable: Ln_Y

8. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,622 ^a	,387	,338	,56369

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, Leverage, Belanja Pegawai

b. Dependent Variable: Ln_Y